P-ISSN : 2597-5064
E-ISSN : 2654-8062 DOI 10.37817/ikraith-humaniora.v10i3

Konflik Ekologis dan Eksploitasi Lingkungan dalam Perspektif Ekofeminisme pada Novel "Perempuan yang Menunggu di Lorong Menuju Laut"

[1]Desiana Fitri Amzani, [2]Triana Ahdiati, [3]Oktafiani Catur Pratiwi
[1]Ilmu Politik, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto
[2]Ilmu Politik, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto
[3]Ilmu Politik, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto

E-mail: [1]desiana.amzani@mhs.unsoed.ac.id, [2]triana.ahdiati@unsoed.ac.id, [3]oktafiani.pratiwi@unsoed.ac.id

ABSTRAK

Konflik ekologis di Indonesia bukan semata-mata soal degradasi lingkungan, melainkan manifestasi ketimpangan relasi kuasa atas sumber daya alam yang berdampak terhadap kehidupan masyarakat, terutama perempuan. Penelitian ini bertujuan menganalisis representasi konflik ekologis dan eksploitasi lingkungan dalam perspektif ekofeminisme pada novel "Perempuan yang Menunggu di Lorong Menuju Laut" karya Dian Purnomo. Penelitian menggunakan metode kualitatif interpretatif dengan hermeneutika Hans-Georg Gadamer untuk menafsirkan makna politik dalam narasi novel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa relasi kekuasaan negara dan korporasi direpresentasikan melalui legitimasi perizinan dan keputusan hukum yang memungkinkan eksploitasi sumber daya alam sekaligus menempatkan masyarakat lokal dalam posisi yang tidak setara. Ketimpangan tersebut berdampak pada terancamnya ruang hidup dan penghidupan perempuan, yang kemudian mendorong terbentuknya perlawanan kolektif melalui mobilisasi masyarakat dan advokasi hukum. Penelitian ini menawarkan pembacaan *Eco-Sacrifice Zone* sebagai kerangka interpretatif untuk memahami bagaimana pengorbanan ruang ekologis diproduksi melalui keputusan politik dan dialami secara bergender. Temuan ini memperkuat pemahaman mengenai hubungan antara kekuasaan, ketidakadilan ekologis, dan peran perempuan dalam representasi sastra.

Kata Kunci: Politik Ekologi, Konflik Ekologis, Ekofeminisme, Perempuan.

ABSTRACT

Ecological conflicts in Indonesia are not merely a matter of environmental degradation, but rather a manifestation of unequal power dynamics over natural resources that impact people's lives, particularly those of women. This study aims to analyze the representation of ecological conflicts and environmental exploitation from an ecofeminist perspective in the novel "Perempuan yang Menunggu di Lorong Menuju Laut" by Dian Purnomo. The study employs an interpretive qualitative approach using Hans-Georg Gadamer's hermeneutics to interpret the political meanings within the novel's narrative. The findings reveal that the power relations between the state and corporations are represented through the legitimization of permits and legal decisions that enable the exploitation of natural resources while simultaneously placing local communities in unequal positions. These inequalities threaten women's living spaces and livelihoods, which in turn spur the

DOI 10.37817/ikraith-humaniora.v10i3
P-ISSN : 2597-5064
E-ISSN : 2654-8062

formation of collective resistance through community mobilization and legal advocacy. This study offers a reading of Eco-Sacrifice Zone as an interpretive framework for understanding how the sacrifice of ecological space is produced through political decisions and experienced through a gendered lens. These findings reinforce our understanding of the relationship between power, ecological injustice, and the role of women in literary representation.

Keywords: Political Ecology, Ecological Conflict, Ecofeminism, Women.

1. PENDAHULUAN

Kekerasan tidak hanya berbasis fisik atau individu saja melainkan fenomena sosial yang diperalat untuk mempertahankan ketimpangan, dalam hal ini sumber daya alam sebagai arena kontestasi kekuasaan yang didorong oleh kepentingan ekonomi dan politik yang mengarah pada praktik eksploitasi lingkungan. Logika Kapitalisme melihat alam hanya sebagai mesin pemenuh kebutuhan hidup manusia, alam sebagai bahan baku penguat surplus atas dasar produksi terus menerus tanpa melihat keseimbangan ekosistem sehingga, berakibat pada krisis ekologis. Memasuki tahun 2026 Indonesia berada di era krisis ekologis akut serta menyeluruh, berakibat pada sedikitnya wilayah dengan kategori aman dari kerusakan lingkungan (Walhi, 2026). Pakar lingkungan hidup Indonesia Emil Salim menyampaikan bahwa, kerusakan lingkungan di Indonesia sejalan dengan maraknya pembangunan dengan orientasi pertumbuhan ekonomi tanpa keberlanjutan (Erirura & Yustinus, 2026). Artinya, eksploitasi alam dengan dalih pembangunan melahirkan dampak kerusakan lingkungan yang berimbas pada masyarakat sekitar sehingga berujung pada ketidakadilan ekologis dan melahirkan konflik ekologis.

Konflik ekologis tidak hanya dipahami sebagai isu ekologis semata melainkan hasil dari dinamika politik dan ekonomi yang melibatkan para aktor. Munculnya konflik ekologis ditandai dengan adanya praktik kekuasaan yang mendominasi, mengeksploitasi dan merugikan masyarakat lokal terutama perempuan. Perempuan memiliki kedekatan dengan alam dan dipercaya sebagai pemegang utama sumber daya seperti air, tanah, hutan sebagai kebutuhan hidup. Dengan demikian, praktik eksploitatif terhadap sumber daya alam yang berujung pada konflik ekologis akan berpengaruh terhadap relasi antara perempuan dan alam.

Penindasan terhadap alam berlangsung bersamaan dengan penindasan terhadap perempuan, kedua bentuk penindasan ini merupakan bentuk representasi dari praktik ideologi kapitalisme-patriarki. Ekofeminisme sebagai pemikiran dan gerakan feminisme yang melawan kapitalisme-patriarki atas alam dan perempuan menjadi perspektif yang memotret fenomena-fenomena seperti degradasi lingkungan, yang dimaknai tidak hanya berdasar pada faktor ekologis semata, melainkan berakar dari struktur kekuasaan dan teknologi yang bersifat kapitalisme-patriarki.

Dalam politik ekologi, praktik eksploitasi sumber daya yang menimbulkan kerusakan tidak terjadi secara netral, melainkan menempatkan wilayah dan komunitas tertentu sebagai ruang yang dikorbankan demi kepentingan ekonomi dan politik. Wilayah semacam ini dipahami sebagai zona pengorbanan (*sacrifice zone)*. Steve Lerner menyimpulkan bahwa, wilayah dengan kerusakan lingkungan terkonsentrasi secara tidak proporsional dibandingkan dengan manfaat lingkungan harus disebut sebagai zona pengorbanan *(sacrifice zone)*. Bagi Lerner, konsep *sacrifice zone* memperlihatkan adanya hubungan politik-ekonomi yang berpengaruh terhadap ketidakadilan ekologis (Juskus, 2023). Pengorbanan ini umumnya dilegitimasi melalui keputusan politik dan instrumen hukum, serta memengaruhi kelompok yang paling lemah dalam akses dan kontrol terhadap sumber daya. Karena itu, konflik ekologis di Sangihe sebagaimana direpresentasikan dalam novel dapat dibaca bukan hanya sebagai konflik antara masyarakat dan perusak lingkungan,

P-ISSN : 2597-5064
E-ISSN : 2654-8062 DOI 10.37817/ikraith-humaniora.v10i3

tetapi sebagai proses pengorbanan ruang ekologis.

Konflik ekologis yang menindas alam dan perempuan dapat direpresentasikan dalam sebuah teks berupa karya sastra yang merefleksikan realitas sosial kehidupan masyarakat (Kottama et al., 2026). Salah satu fungsi sebuah karya sastra ialah menarasikan konflik sosial untuk membuka pemikiran pembaca mengenai peristiwa yang melahirkan penindasan sebagai narasi kritik dan perlawanan. Salah satu karya sastra yang dapat merefleksikan realias sosial sekaligus mengandung kritik dan perlawanan ialah novel. Salah satunya ialah novel karya Dian Purnomo tahun 2023 dengan judul "Perempuan yang Menunggu di Lorong Menuju Laut". Novel ini menjadi bentuk dokumen sastrawi yang merefleksikan fenomena berupa konflik ekologis dari adanya penindasan sekaligus ketidakadilan ekologis yang ada di pulau Sangihe.

Sa'adatul dan Resdianto (2025) memfokuskan kajiannya pada pergerakan dan perlawanan perempuan Sangihe, sedangkan Islamiyah et al. (2026) meneliti konflik ekologis melalui ekokritik Greg Garrard dan resistensi budaya lokal. Kedua kajian tersebut memberi perhatian pada hubungan perempuan dengan alam, kerusakan lingkungan, dan bentuk perlawanan. Namun, pembacaan yang berfokus pada pengalaman perempuan dan resistensi ekologis belum dengan sendirinya menjelaskan bagaimana keputusan politik, legitimasi kebijakan, dan ketimpangan akses terhadap sumber daya saling berkaitan dalam membentuk ketidakadilan ekologis. Sementara itu, kajian tentang konflik ekologis dan eksploitasi lingkungan dalam perspektif ekofeminisme telah memperdalam pemahaman mengenai struktur kekuasaan, praktik eksploitasi yang merujuk wilayah dan komunitas dalam hal ini perempuan yang menanggung beban kerusakan akibat aktivitas ekonomi dan keputusan politik. Dengan demikian, penelitian sebelumnya belum secara memadai menjelaskan bagaimana legitimasi kebijakan, distribusi kontrol sumber daya, dan ketimpangan gender direpresentasikan secara saling berkaitan dalam konflik ekologis.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pembacaan ekofeminis terhadap pembentukan *eco-sacrifice zone* sebagai praktik politik yang direpresentasikan melalui hubungan antara legitimasi negara, kepentingan ekonomi ekstraktif, dan ketimpangan gender. Melalui hermeneutika Gadamer, penelitian ini tidak berhenti pada identifikasi eksploitasi lingkungan dan perlawanan perempuan sebagai tema naratif, tetapi menafsirkan bagaimana keputusan politik dan hukum digambarkan sebagai mekanisme yang menempatkan alam dan perempuan dalam posisi menanggung beban pembangunan. Konsep *eco-sacrifice zone* digunakan sebagai kerangka interpretatif untuk menegaskan dimensi gender dalam pengorbanan ruang ekologis, sekaligus memperlihatkan perlawanan perempuan sebagai bentuk kontestasi terhadap legitimasi kekuasaan ekstraktif.

Melalui perspektif ekofeminisme dan pembacaan hermeneutika penelitian ini bertujuan untuk memaknai atau menafsirkan teks untuk membongkar struktur kekuasaan di dalamnya yang mendeskripsikan konflik ekologis dan eksploitasi lingkungan dalam perspektif ekofeminisme pada "Novel Perempuan yang Menunggu di Lorong Menuju Laut," sekaligus memberikan kontribusi sebuah langkah yang diharapkan dapat membuka model pembacaan lebih produktif bagi penelitian politik kontemporer.

2. LANDASAN TEORI

Politik ekologi memandang bahwa segala fenomena lingkungan yang terjadi seperti deforestasi, banjir, bahkan konflik ekologis selalu berkaitan dengan siapa yang memiliki akses dan kontrol atas sumber daya alam. Dalam teori politik ekologi menekankan ada tiga aktor utama yakni, negara, korporasi dan masyarakat lokal (Sanusi, 2025). Negara dan korporasi sebagai aktor dominan dalam praktik ekonomi ekstraktif, dan masyarakat lokal sebagai pihak yang paling rentan terdampak, hal ini berujung pada ketidakadilan ekologis, yang melahirkan konflik ekologis sebagai hasil dari distribusi kekuasaan tidak merata antara negara, korporasi, dan masyarakat atas kontrol sumber daya alam.

Melalui perspektif ekofeminisme yang melihat adanya relasi antara perempuan dan alam maka, penindasan terhadap alam juga penindasan terhadap perempuan. Kedua penindasan tersebut menjadi wujud dari ideologi kapitalisme-patriarki bekerja. Dalam hal ini melalui peran negara dan korporasi, ideologi kapitalisme-patriarki hadir untuk mengeksploitasi alam sebagai mesin raksasa

pemenuh kebutuhan dan perempuan menjadi pihak yang akan terdampak paling awal. Sehingga, ekofeminisme hadir sebagai perspektif yang melawan bekerjanya ideologi kapitalisme-patriarki atas alam dan perempuan melalui perlawanan (Ayu, 2023).

3. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif interpretatif dengan pendekatan hermeneutika filosofis Hans-Georg Gadamer untuk memahami representasi konflik ekologis, eksploitasi lingkungan, dan relasi kekuasaan dalam novel Perempuan yang Menunggu di Lorong Menuju Laut karya Dian Purnomo (2023). Pendekatan ini digunakan karena karya sastra dipahami bukan semata-mata sebagai representasi pengalaman sosial, melainkan juga sebagai ruang pembentukan dan kontestasi makna mengenai kekuasaan, ketidakadilan ekologis, dan resistensi perempuan. Sumber data primer penelitian adalah novel "Perempuan yang Menunggu di Lorong Menuju Laut" sedangkan sumber data sekunder meliputi literatur ilmiah mengenai politik ekologi, ekofeminisme, konflik sumber daya alam, serta konsep *sacrifice zone*. Unit analisis mencakup narasi, dialog antartokoh, representasi tindakan, dan peristiwa dalam novel yang berkaitan dengan penguasaan sumber daya alam, legitimasi negara dan korporasi, dampak eksploitasi lingkungan, serta perlawanan perempuan. Analisis dilakukan melalui pembacaan hermeneutis dengan memperhatikan hubungan antara bagian-bagian teks dan keseluruhan struktur naratif, menggunakan prinsip *fusion of horizons* atau peleburan cakrawala, yaitu proses mempertemukan horizon pemahaman yang terkandung dalam teks dengan horizon penafsir yang dibentuk oleh pengetahuan teoretis dan konteks sosial-historisnya. Melalui proses tersebut, pemaknaan tidak berhenti pada deskripsi cerita, tetapi diarahkan untuk mengidentifikasi struktur relasi kuasa dan makna politik yang muncul dari keseluruhan narasi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Politik Ekologi dan Perspektif Ekofeminisme dalam Karya Sastra

Ekologis sebagai organisme alam yang menopang penghidupan makhluk hidup di bumi telah bergeser menjadi objek produksi dan pembangunan. Pelaksanaan produksi dan pembangunan tanpa memperhatikan keseimbangan ekosistem hanya akan melahirkan kerusakan lingkungan. Melalui lensa politik ekologi yang melihat bahwa "lingkungan" merupakan arena distribusi kekuasaan, siapa yang berhak dan siapa yang terdampak (Sanusi, 2025). Robbins 2012 menyoroti ada tiga aktor utama yakni negara, korporasi, dan masyarakat lokal/adat (Sanusi, 2023).

Negara sebagai aktor dominan, melalui wewenangnya secara *legitimate* negara dapat memproduksi kebijakan dan peraturan yang dapat mengikat fungsional dari suatu sumber daya alam. Kedua yaitu, korporasi sebagai entitas dengan otak kapitalis yang menjalankan praktik-praktik ekonomi ekstraktif bersifat eksploitatif guna kepentingan ekonomi. Ketiga yaitu, masyarakat lokal sebagai pihak rentan yang paling dirugikan akibat kerusakan lingkungan, mereka hidup berdampingan dengan alam dan bertahan hidup dari hasil alamnya. Sehingga, ketika alam direnggut oleh kepentingan politik dan ekonomi maka, masyarakat lokal yang akan menanggung dampaknya. Sejalan dengan pemikiran Bryant dan Bailey bahwa, hubungan antara masyarakat lokal dengan kerusakan alam didorong oleh adanya kepentingan politik dan ekonomi (Sanusi, 2025). Artinya, keuntungan hanya berputar pada dua aktor saja, sedangkan aktor ketiga yakni masyarakat menjadi bagian yang terdampak dan termarginalisasi. Kondisi ini berujung pada ketimpangan dalam kontrol dan akses sumber daya alam.

Ketimpangan akses dan kontrol menjadi faktor munculnya konflik ekologis, sebuah konflik politik yang berkaitan dengan siapa yang diberi dan memberi izin dan siapa yang dianggap sah atas akses terhadap sumber daya. Selain itu, pemusatan akses dan kontrol terhadap sumber daya alam bersifat politis yang melibatkan pembentukan formal oleh negara, relasi patronase, hingga terjadinya intimidasi atau kriminalisasi terhadap masyarakat (Sanusi, 2025). Konflik ekologis menjadi hasil dari adanya distribusi keadilan yang tidak merata,

P-ISSN : 2597-5064
E-ISSN : 2654-8062 DOI 10.37817/ikraith-humaniora.v10i3

masyarakat yang selama ini merawat, menjaga, dan hidup berdampingan dengan alam harus mendapatkan dampak secara nyata akibat adanya praktik kepentingan yang didasari oleh adanya hak siapa yang berkuasa. Masyarakat menjadi bagian paling rentan, minim akses, dan minim pengetahuan menjadi kelas marginal yang dirugikan, terutama perempuan, ketika alam dirusak maka aktivitas perempuan terhambat, hal ini memicu adanya beban baru bagi perempuan. Sehingga ketika kekuasaan kapital mengambil alih sumber daya alam atas nama pembangunan, maka perempuanlah yang pertama kehilangan basis penghidupannya.

Penindasan terhadap perempuan dan alam berlangsung dengan logika yang sama yaitu, logika kapitalisme-patriarki yang mendominasi dengan memandang perempuan dan alam sebagai objek yang dikuasai, dieksploitasi, dan dikendalikan oleh pihak yang lebih berkuasa (Firnanda et al., 2025). Ekofeminisme lahir sebagai pemikiran atas dasar hubungan antara perempuan dan alam yang mengkritik dan melawan ideologi maskulin dengan logika pembangunan ekonomi ekstraktif yang menindas. Ekofeminisme ditandai dengan etika penolakan mengenai hal-hal yang berujung menghancurkan lingkungan maupun yang menimbulkan bias gender dan merugikan generasi mendatang.

Dalam hal ini perspektif Shiva melihat kapitalisme adalah sistem ekonomi yang memunculkan dampak negatif di kehidupan manusia melalui struktur dan kultur penindasan yang inheren. Selain itu, Shiva juga mengkritik kapitalisme-patriarki baik secara sistem, moral, maupun kebijakan yang tidak memberikan keadilan terhadap perempuan dan alam (Ayu, 2023). Kapitalisme-patriarki bercorak pemikiran materialistis yang menempatkan kepentingan materi di atas segalanya. Dampak negatif dari cara pandang materialistis terhadap perempuan dan alam dapat menurunkan rasa hormat "keluhuran alam dan tubuh perempuan" alam dijadikan sebagai pemenuh bahan baku produksi dan tubuh perempuan sebagai objek sasaran yang menanggung dampak atas kerusakan alamnya. Menurut Shiva kapitalisme-patriarki mengalami kesalahan fundamental dalam memahami produktivitas untuk mengejar surplus, karena perspektif ekofeminisme memandang konsep surplus menjadi bentuk kekerasan terhadap alam (Ayu, 2023). Dengan demikian, perspektif ekofeminisme sebagai lensa berpikir untuk melawan ideologi kapitalisme-patriarki dengan praktiknya menaklukan alam dan mereduksi hak-hak perempuan atas alamnya.

Konflik ekologis yang menindas alam dan perempuan dapat ditafsirkan melalui karya sastra. Karya sastra merupakan wujud dari realitas sosial yang menampilkan gambaran kehidupan secara nyata. Selain itu karya sastra juga menempati posisi aktif sebagai media kritik dan perlawanan. Melalui sudut pandang romantik, sastra digunakan untuk merombak keadaan masyarakat yang tidak sesuai dengan norma-norma keadilan. Melalui kajian pascakolonial, fungsi kritik ini diperluas dengan membongkar struktur kekuasaan dan praktik dominasi politik yang termanifestasi dalam bentuk penjajahan baru seperti, penjajahan ekonomi oleh korporasi yang dilegitimasi oleh negara. Fungsi kritik dan perlawanan direpresentasikan dalam novel "Perempuan yang Menunggu di Lorong Menuju Laut" karya Dian Purnomo tahun 2023, novel ini tidak hanya mendeskripsikan konflik tambang tetapi juga dapat dimaknai untuk membongkar mekanisme ketidakadilan bekerja melalui refleksi para tokoh di dalamnya.

"Perempuan yang Menunggu di Lorong Menuju Laut karya Dian Purnomo": Karya Sastra Sebagai Kritik dan Perlawanan

Novel ini ditulis oleh Dian Purnomo dengan nama lahir Dian Yuliasri lahir pada tanggal 19 Juli 1976 di Salatiga, ia merupakan seorang novelis dengan rekam jejaknya sebagai peneliti isu sosial yang terlibat dalam beberapa riset tentang gender khususnya perempuan dan anak serta isu lingkungan. *(WeSpeakUp.org,* 2026*).* Bekal pemahaman berdasarkan riset yang dibawakan menjadi modal utama ia menulis dan menarasikan kisah-kisah yang terjadi berbasis nyata, seperti halnya dengan novel "Perempuan yang Menunggu di Lorong Menuju Laut" yang direpresentasikan melalui narasinya sebagai wujud kritik, perlawanan, sekaligus informasi mengenai kondisi dan keadaan ekologis yang terjadi di wilayah Indonesia Timur.

Novel ini diterbitkan pada tahun 2023 dengan latar belakang yang cukup aktual mengenai isu tambang di Pulau Sangihe sekaligus sebagai dokumen sastrawi yang berisi nilai advokasi mengenai konflik ekologis. Selain itu, novel ini juga sebagai arena membawakan kritik dan perlawanan yang dibalut dengan sastra. Novel menggambarkan kondisi Sangihe yang terancam oleh praktik

eksploitasi sekaligus menceritakan pihak-pihak yang terdampak sebagai cerminan akibat dari praktik ideologi kapitalisme-patriarki. Dengan pembacaan seperti ini maka, novel dengan judul "Perempuan yang Menunggu di Lorong Menuju Laut" menjadi arena yang memuat realitas sosial bagaimana praktik kekuasaan bekerja melalui dominasi aktor yang berujung pada konflik yang mengancam masyarakat lokal terutama perempuan.

Konflik Ekologis dan Eksploitasi Lingkungan dalam Perspektif Ekofeminisme pada "Novel Perempuan yang Menunggu di Lorong Menuju Laut"

Novel ini menceritakan Pulau Sangihe sebagai ruang ekologis dengan potensi sumber daya emas yang besar, masyarakat Sangihe diibaratkan seperti hidup dan tidur di atas emas. Akan tetapi, kekayaan yang melimpah bukan menjadi keutuhan dan kemakmuran bagi masyarakat Sangihe, melainkan sebagai ancaman dari adanya kekuasaan dengan ideologi kapitalisme-patriarki yang hanya melihat alam sebagai komoditas produksi dengan nilai tinggi. Melalui pandangan ekofeminisme realitas sosial dalam novel menunjukkan praktik ideologi kapitalisme-patriarki yang bekerja tidak hanya menundukkan manusia tetapi juga menaklukan tubuh bumi itu sendiri dengan menentukkan bagian mana dari alam yang dikeruk dan dieksploitasi, siapa yang diberi dan memberi izin, serta siapa yang menanggung dampaknya.

Peralihan ruang ekologis Sangihe dari ruang hidup menjadi ladang komoditas yang dikeruk dan dieksploitasi memperlihatkan bagaimana sebuah kekuasaan dengan ideologi kapitalisme-patriarki memandang alam sebagai sumber daya dengan guna memenuhi kebutuhan ekonomi jangka pendek dibanding keberlangsungan lingkungannya (Prakoso & Supriyanto, 2026). Dengan pembacaan seperti ini maka dapat diinterpretasikan bahwa kekuasaan ekologis dengan ideologi kapitalisme-patriarki melalui kerangka bekerja eksploitatif memandang alam sebagaimana tubuh yang tidak berdaya yang hanya bisa ditindas, dikuasai dan berujung pada ketimpangan dan ketidakadilan ekologis.

Ketimpangan ekologis dipengaruhi oleh beberapa aspek seperti ekonomi, politik, dan sosial yang memiliki keterkaitan dengan pengelolaan sekaligus perubahan dari lingkungan, studi politik ekologi menekankan hal ini ke dalam relasi aktor dalam mengambil kebijakan dan tata kelola (Fienda, 2023). Dalam kerangka politik ekologi terdapat tiga aktor utama, pertama yakni negara, dalam hal ini pemerintah sebagai elit pusat yang seharusnya memiliki wewenang untuk melahirkan regulasi pengelolaan dengan prinsipnya "berdaulat atas sumber daya alam" dan membuat keputusan untuk kesejahteraan masyarakat.

Dalam novel dinarasikan bahwa negara membuat aturan perlindungan larangan untuk menambang pulau dengan luas di bawah 200 hektare salah satunya Sangihe. Akan tetapi, negara justru mendistribusikan akses kekayaan alam tanpa menghiraukan kebijakan yang telah ia buat, seperti dengan memberikan izin terhadap korporasi guna menjalankan roda kapitalis untuk mengeruk Pulau Sangihe. Sejalan dengan analisis Bryant 1991 yang menyepakati argumen bahwa negara lebih mementingkan kepentingan bisnis atau ekonomi dibanding dengan kesinambungan lingkungan (Fienda, 2023).

Kekuasaan juga merabah sampai dengan elit lokal, kapitalaun atau kepala kampung Sangihe sebagai perpanjangan tangan elit pusat menunjukkan keberpihakannya terhadap praktik eksploitasi yang mengancam keberlangsungan atas tanahnya sendiri dengan cara mempengaruhi masyarakat untuk menjual tanahnya ke korporasi. Ini menunjukkan bahwa kekuasaan yang menindas tidak hanya dimaknai sebagai ideologi yang lahir dari kelas penguasa tingkat tinggi, melainkan sebuah struktur pemikiran dengan ideologi kapitalisme-patriarki yang dapat menjarah melalui kekuasaan tingkat manapun.

Aktor kedua adalah korporasi, salah satu aktor dominan dalam produksi dan distribusi ekonomi, PT Tambang Mas Sangihe yang datang mengendus kekayaan Pulau Sngihe dengan praktik eksploitatif yang didukung oleh legitimasi negara demi keuntungan yang besar, sedangkan masyarakat yang mendiami wilayah tersebut secara turun-temurun tidak memiliki posisi tawar setara di hadapan korporasi maupun negara. Sejalan dengan analisis Bryant bahwa, penguasaha yang berkaitan erat dengan negara dalam sektor ekonomi akan memperoleh keuntungan besar dari kebijakan kontra lingkungan (Fienda, 2023). Aktor ketiga yaitu masyarakat, sebagai aktor yang hidup berdampingan dengan alam. Dalam novel digambarkan bahwa laut sudah seperti rumah bagi mereka sehingga, apabila alam

P-ISSN : 2597-5064
E-ISSN : 2654-8062 DOI 10.37817/ikraith-humaniora.v10i3

dieksploitasi tidak hanya keberlangsungan alam yang mati melainkan keberlangsungan hidup masyarakat juga akan tertindas. Ketergantungan yang kuat terhadap alam menjadikan mereka bukan sebatas pengguna atau pemanfaat sumber daya alam melainkan sebagai penjaga ruang hidup *(lifeworld)* (Sanusi, 2025).

Seperti penggambaran melalui tokoh Oma Tulas dengan kerut wajahnya yang dapat dimaknai sebagai bentuk perjuangan seorang perempuan pesisir menjaga dan merawat alamnya. Masyarakat mencintai alam bukan hanya sekadar menggunakan dan memanfaatkan apa yang ada di dalamnya melainkan melindungi. Melalui narasi "mau suka jadi pupuk (lebih baik jadi pupuk)" dapat ditafsirkan bahwa mereka lebih rela mati untuk keberlangsungan hidup alamnya agar tetap subur. Akan tetapi, dalam praktik kekuasaan kapitalisme-patriarki yang didominasi negara dan korporasi, masyarakat, terutama perempuan, menjadi pihak paling rentan terdampak dan tertindas. Hal ini mencerminkan pemusatan kontrol atas sumber daya pada dua aktor dominan sehingga, berujung pada konflik ekologis.

Konflik ekologis yang terjadi di Pulau Sangihe dilatar belakangi dengan kedatangan korporasi untuk menjadikannya sebagai komoditas tambang dengan izin negara. Latar belakang ini mencerminkan pola umum konflik ekologis di Indonesia, di mana wilayah dengan kekayaan sumber daya alam tinggi justru rentan menjadi sasaran industri ekstraktif yang berdampak besar pada lingkungan (Silalahi, 2026). Kepentingan industri ekstraktif seringkali menimbulkan penolakan terhadap pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, sehingga memunculkan konflik (Sanusi, 2025). Konflik ekologis berakar dari adanya daya tarik menarik terhadap akses dan pengelolaan sumber daya alam, antara masyarakat Sangihe yang memandang alam sebagai entitas ruang hidup sedangkan kekuasaan kapitalisme-patriarki memandang alam sebagai entitas nilai jual tinggi dengan cara dieksploitasi.

Eksploitasi dalam novel tidak hanya dimaknai dalam hal teknis seperti mengeruk tanah mengambil kandungan emas dan lain sebagainya. Realitas sosial Likupang yang disajikan dalam novel dapat dibedah dan dimaknai bahwa, eksploitasi lingkungan lebih dari sekadar persoalan teknis, melainkan bentuk penaklukan total atas tubuh alam. Tanah diperlakukan layaknya tubuh dengan cara dibedah, dikuras, dan dibuang begitu nilai ekonomisnya sudah habis tanpa adanya pertimbangan dan kepedulian bahwa alam sebagai tubuh merupakan organisme yang menopang kehidupan di atasnya. Seperti pemikiran Shiva 1997 eksploitasi yang menindas merupakan wujud dari kekuasaan ekologis dengan ideologi kapitalisme-patriarki yang memandang tubuh alam seperti tubuh perempuan sebagai *natura* atau sesuatu yang dianggap semata-mata sebagai objek produksi, ditindas untuk memenuhi prinsip keuntungan yang masif (Rasiah, Yana, 2020).

Dalam novel disajikan penggambaran dampak-dampak eksploitasi, contohnya yang terjadi di Bulraeng sebuah kampung sisi timur Sangihe yang tertindas dan tereksploitasi alamnya, bagaimana dampak paling ketara ialah pada rusaknya sumber air bersih baik untuk konsumsi maupun untuk ekosistem pesisir, matinya tanah yang subur, serta lubang-lubang bekas galian yang berujung menjadi penyakit. Tanah Bulraeng terdampak akibat dari "Penggalian liar" dalam hal ini ialah penambang rakyat, para pemuda Bulraeng yang bekerja di perusahaan tambang di luar pulau, dengan modal ilmu yang didapat dan alat seadanya mereka pulang dan menambang di tanahnya sendiri.

Akan tetapi, hal ini tidak membawa pada kemakmuran melainkan bencana baru, karena obsesi mengejar keuntungan tidak menghasilkan keberkahan melainkan mendatangkan musibah (Ayu, 2023). Dengan demikian praktik eksploitasi yang dilakukan oleh pemuda Bulraeng merepresentasikan ideologi kapitalisme-patriarki yang memandang alam sebagai profit yang berujung pada kerusakan. Menurut Vandana Shiva dan Mies ketidakadilan dan kerusakan lingkungan merupakan representasi dari kapitalisme-patriarki sebagai dualitas dalam satu tubuh penindasan. Kapitalisme sebagai penggerak roda finansial yang memiliki orientasi besar pada profit, sedangkan patriarki menggerakkan fungsi kontrol dominan yang mengatur ruang masif dan totaliter.

Dalam novel disajikan realitas sosial, bagaimana konflik ekologis lahir sebagai respons dari adanya ketidakadilan dan penindasan atas alam dan perempuan sehingga melahirkan perlawanan. Seperti pemikiran Shiva dan Mies yang menyatakan bahwa konsep sebuah perjuangan dalam rangka

DOI 10.37817/ikraith-humaniora.v10i3
P-ISSN : 2597-5064
E-ISSN : 2654-8062

mewujudkan keadilan sosial dan kelestarian lingkungan yakni dengan cara penataan kembali pola pikir manusia terhadap alam dan perempuan untuk melawan ideologi kapitalisme-patriarki. Perlawanan masyarakat Sangihe melalui aliansi yang dibangun bernama "Aliansi Selamatkan Pulau Kami" untuk menyusun strategi dan perlawanan terhadap korporasi, aliansi ini menggunakan rumah perjuangan milik Eben Heizer dan Mafira Makawulu pasangan yang dikenal dengan wajahnya yang semangat untuk melawan. Melalui pembacaan dalam novel, perlawanan ini merupakan bentuk representasi dari ekofeminisme yakni, penolakan terhadap pola pikir atau cara pandang ideologi kapitalisme-patriarki atas alam dan perempuan.

Novel ini sebagai dokumen sastrawi yang kaya akan kritik dan perlawanan, penggambaran perlawanannya dimulai dari penandatanganan ikrar penolakan tambang dan aksi turun lapangan untuk menahan alat berat masuk ke Sangihe yang dikoordinir oleh Shalom, Santiago, Ibu Agatha, Ari Naja, Opa Mapele dan beberapa anggota aliansi lainnya. Penggambaran laki-laki yang tidur di jalan dan ibu-ibu yang menggendong anaknya serta menyusui bayinya duduk memenuhi jalan, realitas tersebut dapat dimaknai sebagai bentuk perjuangan mereka, bagaimana manusia tidak lagi memandang alam sebagai komoditas profit melainkan sebagai ruang hidup yang perlu dijaga dan dilindungi, sebagai pola pikir untuk melawan ideologi kapitalisme-patriarki.

"45 Perempuan Menuntut" sebagai realitas sosial yang disajikan oleh novel menjadi sebuah konsep perjuangan perempuan untuk mempertahankan alamnya. Shalom Mawira sebagai representasi tokoh perempuan yang gigih melawan, perlawanan Shalom atas datangnya korporasi di Pulau Sangihe dilatar belakangi oleh ia yang selama ini hidup berdampingan erat dengan alamnya. Dalam novel digambarkan "tanah sebagai ibu yang menyusui" melalui perspektif ekofeminisme dapat dimaknai sebagai bentuk keterkaitan yang erat antara perempuan yaitu Shalom terhadap alamnya bumi Sangihe, sebagai ruang eksistensial para perempuan Sangihe hidup dan mencari makna.

Shalom Mawira perempuan Sangihe yang sedari kecil selalu merawat dan melindungi alamnya sebagai sebuah harapan bahwa ayahnya akan selalu menemukan jalan untuk pulang melalui jalan kecil (lorong) menuju laut Sangihe, sehingga ketika tanah itu dirampas, kerugian tidak hanya dalam sektor sosial-ekonomi melainkan juga pemusnahan ruang eksistensial tempat Shalom membangun makna hidupnya. Selain Shalom, penggambaran dalam novel juga menunjukkan para perempuan Sangihe yang juga memaknai alam bukan sebagai pemenuh kebutuhan saja melainkan tempat mereka lahir dan mati nantinya.

Dengan demikian, kerusakan lingkungan bukan lagi sebagai peristiwa eksternal yang terjadi "di luar" diri perempuan melainkan sebagai penetrasi kekuasaan yang menembus hingga ruang privat dari identitas dan tubuh perempuan itu sendiri. Dengan pembacaan seperti ini maka dapat dimaknai bahwa, penindasan melalui praktik eksploitasi dengan ideologi kapitalisme-patriarki bekerja bukan hanya merampas alam melainkan juga merampas makna dan fungsi yang selama ini menopang kehidupan perempuan atas alamnya.

Perlawanan Shalom dan perempuan Sangir tidak lahir dari tangan kosong. Pembacaan atas novel memperlihatkan bahwa perlawanan tersebut berangkat dari dampak-dampak kerusakan lingkungan yang sudah mereka dengar dan saksikan di Bulraeng dan Likupang, sebagai cermin bagi Sangihe dan dorongan untuk bergerak. Perlawanan perempuan Sangir tidak berhenti pada perlawanan fisik saja melainkan merabah sampai ke ranah hukum yang dipimpin oleh Shalom, mereka mengajukan tuntutan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Manado mengenai izin pertambangan, sesuai dengan usaha mereka pada tahap ini mereka menang, akan tetapi perjuangan tidak sampai di sini. Dinamika perjuangan masih terus berjalan karena perusahaan tambang mengajukan banding di pengadilan tinggi Makassar, pada tahap ini kabar buruk diterima oleh masyarakat Sangihe, karena banding yang diajukan korporasi diterima dan perusahaan tambang dinyatakan legal beroperasi. Akan tetapi, kegagalan tersebut tidak mematahkan semangat perjuangan, mereka tetap melawan dengan cara apapun.

Perlawanan atas ideologi kapitalisme-patriarki yang mengancam terus dilakukan, kali ini mereka turun ke jalan dan menyampaikan aspirasi di depan gedung DPRD. Dalam novel disajikan bagaimana kemarahan masyarakat Sangihe dengan mempertanyakan kedudukan mereka di mata negara. "Dengan senang hati torang akan kembali ke torang pe nenek

P-ISSN : 2597-5064
E-ISSN : 2654-8062 DOI 10.37817/ikraith-humaniora.v10i3

moyang, Filiphina. Merdeka! (dengan senang hati saya akan kembali ke nenek moyang saya Filiphina. Merdeka!)". Narasi yang diteriakkan oleh Shalom di depan gedung DPRD, berujung pada viralnya video bertajuk "Aliansi Selamatkan Pulau Kami akan melepaskan diri dari Indonesia" dinamika perlawanan semakin memanas dengan ditangkapnya tiga pejuang salah satunya ialah Shalom, mereka ditangkap akibat tuduhan upaya makar.

Penangkapan tersebut tidak meruntuhkan kegigihan perempuan Sangir untuk tetap berada di garis perlawanan. Dalam novel digambarkan tekad perjuangan sampai titik darah penghabisan, melalui perspektif ekofeminisme pernyataan "titik darah penghabisan" bukan sebagai retorika emosional melainkan mencerminkan komitmen ekofeminis untuk menolak dominasi kapitalisme-patriarki. Dengan pembacaan seperti ini maka dapat ditafsirkan bahwa, semangat perjuangan perempuan Sangir menjadi interpretasi adanya penolakan terhadap penetapan alam Sangihe sebagai zona korban dan perempuan yang akan membayar dan menerima dampaknya.

Berdasarkan realitas sosial dalam novel, putusan pengadilan dapat dimaknai sebagai kapitalisme-patriarki yang bekerja merembes ke ranah putusan hakim dengan bentuk legitimasi hukum formal yang berpihak pada penetapan Sangihe sebagai ruang yang boleh dikorbankan tanpa memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat. Fenomena tersebut mencerminkan bentuk dari zona pengorbanan *(sacrifice zone)* yakni, sebuah wilayah dengan sumber daya alam tinggi yang dieksploitasi demi kepentingan para aktor eksternal (Adijaya et al., 2026). Perlawanan masyarakat terutama Perempuan Sangir yang masih memandang bahwa alam Sangihe diciptakan untuk mereka, merupakan bentuk klaim atas alam sebagai ruang yang menopang kehidupan sehari-hari. Melalui pemaknaan pada teks, perlawanan dan klaim tersebut menjadi wujud kontra atau penolakan terhadap penetapan Sangihe sebagai zona pengorbanan.

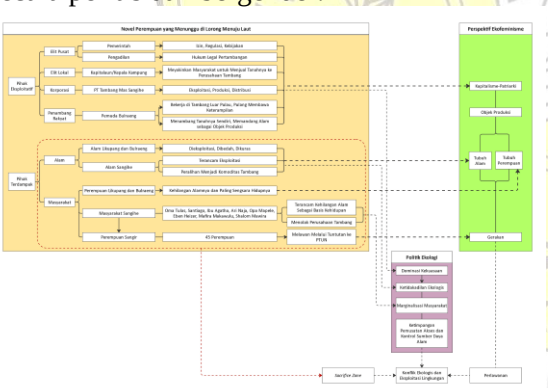
Melalui pembacaan seperti ini maka dapat dimaknai bahwa, kapitalisme-patriarki sebagai ideologi yang menindas alam dan perempuan sehingga berujung pada sebuah perlawanan melahirkan permasalahan ekologis serius berupa konflik ekologis, yang lahir dari adanya kekuasaan ekologis yang timpang sehingga mewujudkan praktik-praktik eksploitatif yang dilakukan oleh para aktor dominan, sedangkan masyarakat terutama perempuan sebagai aktor yang selama ini hidup bergantung dengan alam akan menanggung dampak dan beban yang ditinggalkan dan termarginalisasi. Hal ini menandakan adanya pemusatan akses dan kontrol atas sumber daya alam yang berujung pada konflik dan melahirkan dampak baru yaitu adanya pihak yang dikorbankan dan diuntungkan. Dalam hal ini korporasi representasi ideologi kapitalisme-patriarki sebagai pihak yang diuntungkan sedangkan alam dan perempuan sebagai pihak yang dikorbankan.

Zona pengorbanan *(sacrifice zone)* merujuk pada alam Likupang dan Bulraeng yang menjadi akibat dari adanya praktik ekonomi ekstraktif. Melalui cerminan Likupang dan Bulraeng, Sangihe sebagai alam yang terancam mendapati hal yang serupa melalui penetapan peradilan yang melegalkan penambangan di Sangihe menjadi bagian dari zona pengorbanan *(sacrifice zone)*, sebuah kondisi yang diproduksi secara politik melalui rangkaian keputusan tentang izin yang diterbitkan dan siapa yang menanggung kerusakan (Adijaya et al., 2026). Melalui pembacaan atas novel dan peleburan horizons peneliti dan teks dapat ditafsirkan melalui lensa politik ekologi dan ekofeminisme bahwa kapitalisme-patriarki yang berujung pada ketidakadilan ekologis menetapkan alam dan perempuan sebagai zona yang boleh dikorbankan melalui legitimasi hukum sehingga menciptakan penindasan baru yakni *Eco-Sacrifice Zone*.

Eco-sacrifice zone dalam penelitian ini dikembangkan dari *sacrifice zone*, yakni konsep yang menjelaskan bagaimana pengorbanan diproduksi melalui praktik ekonomi ekstraktif demi kepentingan akumulasi keuntungan yang berdampak mengorbankan ruang ekologis sekaligus komunitas lokal yang harus menanggung beban. *Eco-Sacrifice Zone* sebagai konsep temuan dalam penelitian ini, digunakan untuk menafsirkan ruang ekologis dalam novel yang harus menanggung dan membayar kerusakan sebagai dampak dari berkembangnya kekuasaan dengan ideologi kapitalisme-patriarki, *"eco"* sebagai penjelas bahwa *Sacrifice Zone* yang lahir dalam penelitian ini dimaknai melalui *ecofeminist perspective*. Melalui perspektif ekofeminisme, penelitian memperbarui pembacaan *sacrifice zone* dengan melihat kerusakan lingkungan dan beban yang ditanggung perempuan sebagai satu rangkaian proses pengorbanan.

DOI 10.37817/ikraith-humaniora.v10i3
P-ISSN : 2597-5064
E-ISSN : 2654-8062

Penambahan *"eco"* tidak dimaksudkan sebagai label, melainkan menandai pergeseran unit analisis dari wilayah dan komunitas menuju relasi antara perempuan dan alam sebagai satu kesatuan yang dikorbankan. *Eco sacrifice zone* menegaskan bahwa pengorbanan ruang ekologis bukan sekadar dari akibat ekstraksi melainkan hasil dari praktik politik yang bekerja melalui logika kapitalisme-patriarki yang menindas alam dan perempuan. Melalui pembacaan realitas sosial dalam novel ruang ekologis sebagai zona pengorbanan dilegitimasi melalui izin dan putusan hukum yang menentukan siapa yang berkuasa dan siapa yang menanggung beban kerusakannya sebagai bentuk penetrasi dari kekuasaan kapitalisme-patriarki yang berdampak langsung terhadap perempuan, yang menanggung dan membayar beban paling awal, beban yang ditanggung perempuan bukan hanya akibat dari kerusakan melainkan bagian dari pengorbanan itu sendiri. Dengan demikian, *eco-sacrifice zone* menafsirkan kerusakan ruang ekologis dan perempuan sebagai pihak yang menanggung beban, sebagai satu kesatuan yang dikorbankan secara politis dan bergender.



Gambar 1. Bagan hasil Konflik Ekologis dan Eksploitasi Lingkungan dalam Perspektif Ekofeminisme pada Novel Perempuan yang Menunggu di Lorong Menuju Laut..

5. KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa novel "Perempuan yang Menunggu di Lorong Menuju Laut" Karya Dian Purnomo, melalui lensa politik ekologi dan ekofeminisme merepresentasikan konflik ekologis dan eksploitasi lingkungan sebagai manifestasi ketimpangan relasi kuasa atas sumber daya alam. Kondisi ini melahirkan ketidakadilan ekologis yang mengancam ruang hidup masyarakat terutama perempuan, sebagai pihak yang terdampak paling awal dan kehilangan basis penghidupan ketika alam dieksploitasi, sebagaimana yang tergambar pada Likupang dan Bulraeng sebagai cermin bagi Sangihe. Pembacaan dengan pendekatan hermeneutika Gadamerian membongkar struktur kekuasaan dalam novel yang bekerja melalui logika kapitalisme-patriarki, yakni logika yang memosisikan alam dan perempuan sebagai objek yang didominasi melalui legitimasi negara, dengan perizinan dan putusan hukum di sektor pertambangan. Dalam hal ini perlawanan masyarakat dan perempuan Sangihe tidak semata-mata merupakan respons terhadap kerusakan lingkungan, tetapi juga mencerminkan kontestasi atas legitimasi politik dalam penguasaan sumber daya alam. Melalui interpretasi terhadap pengalaman perempuan dan representasi keputusan politik dalam novel, penelitian ini mengembangkan pembacaan *eco-sacrifice zone* untuk menjelaskan dimensi gender dalam proses pengorbanan ruang ekologis. Dalam perspektif ekofeminisme, *eco-sacrifice zone* dimaknai sebagai penetapan politis kapitalisme-patriarki yang mengobjektifikasi alam dan perempuan sebagai pihak yang boleh dikorbankan demi akumulasi keuntungan. Dengan demikian, perlawanan perempuan dalam merawat dan mempertahankan alam menjadi praktik penolakan atas konflik ekologis dan eksploitasi lingkungan yang masuk dalam *eco-sacrifice zone.*

DAFTAR PUSTAKA

Adijaya, S., Danial, Zainal, Laxmi, Raemon, Koodoh, E. E., & Intang. (2026). Bencana Ekologis dan Tragedi Kemanusiaan di Konawe Utara: Banjir Bandang, Hilangnya Desa, dan Ketidakadilan Lingkungan bagi Orang Culambacu dan Orang Tolaki. *Jurnal Wilayah, Kota Dan Lingkungan Berkelanjutan*, *5*(Volume 5, Nomor 1, Juni 202), 107–121.

Ayu, A. N. (2023). Konsep Ekofeminisme Vandana Shiva Dalam Perspektif Filsafat Lingkungan Hidup. *Journal*, 7.

Batubara, E., & Stirman, Y. A. (2026, April 16). Wawancara Emil Salim: Krisis lingkungan dan tanggung jawab negara. Betahita. https://betahita.id/news/detail/11995/wawancara-emil-salim-krisis-

lingkungan-dan-tanggung-jawab-negara.html?v=1776335830.

Fienda, T. E. (2023). *POLITIK EKOLOGI DAN POST-EXTRACTIVISM*.

Firnanda, A., Ihsan, Z., Wardani, M. A. S., & Efendi, A. N. (2025). Narasi Alam Dan Perempuan Dalam Cerpen Pilihan Kompas Edisi 2025. *ALINEA-Jurnal Bahasa, Sastra, Dan Pengajaran*, *5*(3), 760–774. http://ejournal.baleliterasi.org/index.php/alinea

Islamiyah Nurul, Asawandikari, John M, Ahmad S, Sahrudin (2026). Konflik Ekologis dan Resistensi Budaya Lokal Dalam Novel Mata di Tanah Melus Karya Okky Madasari, Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, 9, No, 1, 264-277. https://doi.org/10.29408/sbs.v9i1.33433.

Juskus, R. (2023). Sacrifice Zones: A Genealogy and Analysis of an Environmental Justice Concept. Environmental Humanities, 15(1), 3–24.

Kottama, R. S., Ilmubudaya, F., & Mada, U. G. (2026). *Novel Indonesia Sebagai Cermin Realitas*. *02*, 13–18.

Lutfiyah Sa'adatul & Resdianto Permata Raharjo (2025). Peran Perempuan dalam Penyelemataman Alam dalam Novel Perempuan yang Menunggu di Lorong Menuju Laut Karya Dian Purnomo: Kajian Ekofeminisme. Universitas Negeri Surabaya. 12. No 2 219-228. https://doi.org/10.70134/basadya.v2i1.1072.

Prakoso, J., & Supriyanto, A. (2026). Penegakan Hak-Hak Alam Di Indonesia Ditinjau Dalam Perspektif Deep Ecology Dan Should Trees Have Standing? *El-Dusturie*, *5*(2), 107–125. https://doi.org/10.21154/eldusturie.v5i2.13572.

Rasiah, Yana, dan F. B. (2020). *KRITIK TERHADAP KAPITALIS-PATRIARKIS DAN PERSPEKTIF SUBSISTENSI DALAM NOVEL AROMA KARSA KARYA DEWI LESTARI Rasiah,*. *4*(1), 1–9. http://www.stumblingrobot.com/2015/09/25/find-the-rate-of-change-in-volume-of-a-right-circular-cylinder/

Sanusi, A. (2025). *POLITIK EKOLOGI DAN MASA DEPAN KEBIJAKAN LINGKUNGAN DI INDONESIA* (F. A. Pratama, Ed.). PT Arr Rad Pratama.

Syahrier, F. A., Pratama, G., Al Kausar, J., & Sazeta, M. (2024). Analisis Konflik Masyarakat Dan Pemerintah Terhadap Dampak Transportasi Angkutan Pertambangan Batu Bara Di Kabupaten Indragiri Hulu. *Jdp (Jurnal Dinamika Pemerintahan)*, *7*(2), 394–408. https://doi.org/10.36341/jdp.v7i2.5068

Purnomo, D. (2023). *Perempuan yang menunggu di Lorong Menuju Laut.* Gramedia Pustaka Utama.

Silalahi, R. W., Azinta, J., Simbolon, S. P. I., Sinaga, M. C., Sipayung, R. C., Simanjuntak, K. M., & Purba, D. G. (2026). Jejak industri ekstraktif: Analisis kerusakan hutan, konflik agraria, dan dugaan pelanggaran oleh PT. Toba Pulp Lestari, Tbk. *Sharing: Journal of Islamic Economics, Management and Business*, *5*(2), 130–142.

WALHI (2026). Tinjauan lingkungan hidup 2026: Membayar mahal ambisi pertumbuhan. https://www.walhi.or.id/tinjauan-lingkungan-hidup-2026-membayar-mahal-ambisi-pertumbuhan.

WeSpeakup.org. Dian Purnomo. We Speak Up. https://wespeakup.org/writers/dian-purnomo/